



Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima Di Masjid Al Akbar Kota Surabaya

Maharani Alvika Sari , Achluddin Ibnu Rochim , Rachmawati Novaria

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : maharani Alvika14@gmail.com didin@untag-sby.ac.id nova@untag-sby.ac.id

Abstract The existence of street vendors at the Al-Akbar Mosque in Surabaya City who sell and buy their goods without complying with existing regulations can cause traffic jams for road users, those who are going to the hospital via the toll road or who have business via the toll road will have difficulties, because of the congestion. traders and buyers who park illegally. De to this incident, the Surabaya city government relocated the traders around the Al-Akbar Mosque to move to the Jambangan People's Market which is on the north side of the Al-Akbar Mosque. The purpose of this research is to provide a description and overview and also analyze the implementation of the Surabaya City Regional Regulation No. 9 of 2014 which discusses the provision of space for street vendors, not only to identify the supporting and inhibiting factors contained in the Regional Regulation policy. Surabaya City No. 9 of 2014. In this research, the method used is a research method by conducting observations, interviews and also documentation as evidence. The results of the research show that the implementation of the arrangement for street vendors is considered to be good but there are still inhibiting factors caused by the decline in the economic condition of the vendors after being relocated.

Keywords: Street Vendor Spatial Planning, Policy Implementation

Abstrak Adanya para pedagang kaki lima yang berada di Masjid Al-Akbar Kota Surabaya yang memperjual belikan dagangannya tanpa menaati peraturan yang ada dapat menyebabkan kemacetan pengguna jalan, mereka yang akan ke rumah sakit melalui jalan tol atau yang akan ada urusan lewat tol jadi kesulitan, karena padatnya pedagang dan pembeli yang parkir liar. Dari kejadian tersebut maka pemerintah kota Surabaya merelokasi para pedagang yang ada di sekitaran Masjid Al-Akbar untuk pindah ke Pasar Rakyat Jambangan yang berada di sebelah sisi utara Masjid Al-Akbar. Adanya penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat memberikan deskripsi maupun gambaran dan juga menganalisa didalam pengimplementasian kebijakan Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 2014 yang membahas tentang adanya suatu penyediaan ruang untuk para pedagang kaki lima tak hanya itu untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang terdapat didalam kebijakan Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 2014. Didalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian dengan cara melakukan observasi, wawancara dan juga dokumentasi sebagai bukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya didalam pengimplementasian penataan pedagang kaki limadinilai sudah baik namun masih memiliki faktor penghambat yang disebabkan oleh kondisi ekonomi para pedagang setelah direlokasi mengalami penurunan.

Kata Kunci : Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima, Implementasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Adanya keberadaan para (PKL) atau dapat diartikan sebagai para pedagang kaki lima yang berada di Surabaya setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan bagi pemerintah dan masyarakat umum karena para pedagang kaki lima dapat mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat menyebabkan kemacetan dan terjadinya kecelakaan serta tatanan kota yang tidak teratur akibat ulah para pedagang yang berjualan di sembarang tempat, seperti menggunakan jalan umum, serta kendaraan para pelanggan yang tidak teratur juga mengganggu ketertiban. Selain masalah yang ditimbulkan para pedagang, pkL ini juga memberikan dampak yang terjadi pada perkembangan sektor bawah karena para pedagang kaki lima menjual dagangannya dengan harga yang lebih murah atau

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 15, 2023; Published: Januari 31, 2024

* Maharani Alvika Sari, maharani Alvika14@gmail.com

terjangkau dibandingkan dengan mall, restaurant dan lain sebagainya. Dan dengan hal ini diharapkan mampu dapat mengurangi masalah seperti perngangguran sebab adanya keberadaan pedagang ini dapat menyediakan lapangan kerja sendiri.

Pemerintah kota Surabaya menerbitkan perda No 9 Tahun 2014 yang dimana hal ini membahas adanya suatu penyediaan ruang bagi para Pedagang kaki Lima yang akan diberikan ruang di pusat perbelanjaan dan juga perkantoran agar dapat mengurangi permasalahan pkl yang banyak berkeliaran di wilayah surabaya.

Keberadaan para pedagang yang berada di Masjid Al-Akbar kota Surabaya yang menjajakan dagangannya tanpa menaati peraturan yang dapat mengganggu akses pengguna jalan yang akan lewat jalan tol dan warga yang akan kerumah sakit lewat jalan tol menjadi terganggu dikarenakan pedagang yang berjualan di sembarang tempat dan adanya pembeli yang parkir ngawur atau sembarangan.

Relokasi Pkl yang dilakukan di masjid Al-Akbar bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi para pelaku usaha agar tidak melakukan perdagangan yang ada di[inggir jalan sehingga mengganggu pengguna jalan yang melintas, tak hanya itu hal ini agar pedagang merasa aman dan tetap menjaga keindahan, kebersihan serta ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif kualitatif dimana untuk mendapatkan sumber data sebagai bahan penelitian ini ialah menggunakan data primer maupun data skunder dengan teknik pengumpulan data secara observasi. Dimana observasi sendiri adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan, observasi ini dilakukan langsung dan melihat keadaan para pedagang disekitar Masjid Al-akbar, wawancara adalah percakapan yang dilakukan dimana hal ini terdiri dari dua orang yang akan melakukan kegiatan pertukaran informasai atau suatu ide mereka untuk melakukan sesi Tanya jawab secara langsung, wawancara dilakukan dengan mewawancarai para pedagang kaki lima, kepala satpol pp kecamatan jambanagn dan kepala bidang dan staff Dinas koperasi usaha kecil dan mmenengah dan perdagangan dan dokumentasi.

Fokus yang digunakan didalam penelitian ini ialah pengimplementasian kebijakan yang terdapat didalam Perda Kota Surabaya no 9 tahun 2019 dimana hal ini membahas tentang adanya suatu penyediaan terhadap ruang bagi para pedagang kaki lima yang berada di masjid Al- Akbar dan fokus kedua yaitu faktor penghambat dan pendukung dalam mengimplemntasikan suatu kebijakan yang sudah tercatata didalam peraturan kebijakan Perda

Kota Surabaya No 9 Tahun 2014 mengenai adanya suatu penyediaan ruang untuk pedagang kaki lima di masjid Al- Akbar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai adanya suatu pengimplementasian didalam kebijakan yang dimiliki oleh Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 2014 dimana hal ini membahas tentang adanya suatu penyediaan ruang bagi pkL di Masjid Al-Akbar :

1. Sasaran kebijakan adalah para pedagang kaki lima yang dimana mereka berjualan tepat di pinggir jalan dan juga memanfaatkan bahu jalan untuk berjualan dagangannya, standart kebijakan penataan pedagang kaki lima berdasarkan kebijakan yang ada didalam Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 2014 mengenai adanya Penyediaan ruang yang diberikan untuk para pedagang kaki lima ini memiliki tujuan didalam meningkatkan suatu kesejahteraan yang akan didapatkan oleh para Pedagang Kaki lima baik itu dari sector formal ataupun sector informal.
2. Adanya suatu sumber daya alam yang ada didalam pengimplementasian kebijakan ini antara lain yaitu (SDM) atau disebut sumber daya manusia dimana hal ini berkaitan dengan adanya kuantitas mereka yang sudah cukup baik dikarenakan didalam keanggotaannya ini sendiri merupakan salah satu pilihan yang tercipta dari dinas terkait dan dari segi kualitas jumlah aparat yang diturunkan sudah memadai sedangkan sumber daya yang lain seperti keamanan, kebersihan dan penyediaan aliran listrik gratis
3. Adanya penilaian didalam karakteristik yang dimiliki oleh badan – badan pelaksana dimana dalam hal ini mencakup suatu struktur yang dimiliki oleh organisasi dalam pengawasan yang secara langsung dilakukan oleh pelaksana kebijakan sehingga struktur organisasi ini nantinya akan memperjelas suatu pembagian didalam kepemilikan tugas masing – masing yang dimiliki oleh pelaksana sehingga hal ini akan menghindari adanya masalah didalam para aparat dan mereka akan mengikuti SOP yang ada
4. Komunikasi yang tercipta antara organisasi yang terkait dengan kegiatan pelaksana ini harus memiliki kelompok sasaran dan juga pihak yang akan dilibatkan sehingga memerlukan adanya suatu koordinasi didalam pelaksanaannya untuk pendataan bagi para pedagang kaki lima dimana pendataan ini meliputi usaha, bidang usaha, tal hanya itu dalam melakukan sosialisasi kepada para pedagang para pelaksana kebijakan melakukan evaluasi melalui rapat koordinasi dan diadakan monitoring, dan setelah melaksanakan sosialisasi dengan para pelaksana kebijakan, para aparat mensosialisasikan para pedagang

kaki lima dengan memberitahu langsung tentang kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mengasih surat edaran.

5. Kondisi politik dalam kebijakan ini sudah efektif ditunjukkan dengan adanya dukungan dari DPRD kota surabaya, dengan adanya perda ini sendiri juga memberikan adanya suatu penyediaan lahan untuk para pedagang kaki lima Setelah para pedagang yang terdapat di masjid Al- Akbar kota surabaya di relokasi mengalami perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi antara lain : pelanggan jadi berkurang, pendapatan para pedagang kaki lima menurun
6. Sikap para pelaksana, dalam melaksanakan kebijakan ini para aparat konsisten dengan selalu melakukan monitoring agar kebijakan tersebut berjalan dengan semestinya, Kedua respon aparat dalam melakukan kebijakan ini sudah cukup baik dan para aparat menerima tujuan dari kebijakan penataan pkl.

Faktor pendukung implementasi kebijakan yaitu: standart dan sasaran kebijakan, adanya suatu komunikasi yang dimiliki oleh organisasi ini berjalan dengan baik dimana sesuai dengan yang dilakukan para pihak pelaksana maka kebijakan dengan para pedagang yang berada dikawasan masjid Al-Akbar kota surabaya menjadi lebih baik. Karakteristik badan pelaksana juga telah memiliki , sumber daya manusia yang ditugaskan sudah cukup memadai sedangkan sumber daya yang lainnya seperti keamanan, kebersihan dan penyediaan aliran listrik secara gratis, sikap para pelaksana. Sedangkan faktor penghambat disini yaitu kondisi ekonomi para pedagang kaki lima, semenjak direlokasi ke PRJ atau Pasar Rakyat Jambangan perekonomian atau pendapatan mereka turun drastis, hal itu dikarenakan para wisatawan atau pengunjung yang berada di masjid Al-Akbar kota surabaya lebih memilih membeli minuman atau makanan di dalam Masjid

PENUTUP

Kesimpulan

Didalam penelitian ini mengenai adanya suatu pengimplementasian terhadap kebijakan Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 2014 yang membahas tentang adanya suatu penyediaan ruang untuk para pedagang kaki lima di masjid Al- Akbar sudah baik, tetapi hal ini masih memiliki beberapa permasalahan yaitu pada kondisi ekonomi para pedagang kaki lima yang setelah direlokasi ke Pasar Rakyat jambangan mengalami penurunan pendapat.

Saran

Saran yang di sampaikan peneliti : Para aparat mengandeng pengelola Masjid Al-Akbar kota Surabaya untuk mengajak para wisatawan atau pengunjung untuk wisata kuliner di

Pasar Rakyat Jambangan, Para aparat tetap menjaga sikap dan konsisten dalam menjalankan perintah agar kebijakan berjalan dengan semestinya ataupun bisa dikatakan berhasil , Agar kondisi ekonomi para pedagang setelah direlokasi tidak menurun sebaiknya para aparat mengadakan event- event untuk memperkenalkan pasar rakyat jambangan ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Putranto, A. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima. *Thesis (Skripsi)*. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/81845>
- Reichenbach, A., Bringmann, A., Reader, E. E., Pournaras, C. J., Rungger-Brändle, E., Riva, C. E., Hardarson, S. H., Stefansson, E., Yard, W. N., Newman, E. A., & Holmes, D. (2019). IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NO. 9 TAHUN 2014 DALAM PENATAAN DAN PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Kedungdoro Surabaya). *Progress in Retinal and Eye Research*, 561(3), S2–S3.